

**KUMPULAN ARTIKEL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

Asep Rusmayadi Purwadi, Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.,  
Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si., Drs. H. Priatama, M.M.,  
Hj. Siti Komariah, M.Si., Ph.D., Dr. Hadiati, M.Si.,  
Dr. Usep Supriatna, M.Pd., Dr. Mohamad Sutisna, M.Pd.,  
Dr. H. Akadun, M.Pd.



# **MEMBUMIKAN PANCASILA**

**pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar**



# **MEMBUMIKAN PANCASILA**

**Pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar**

**KUMPULAN ARTIKEL  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

## **PENULIS**

**Asep Rusmayadi Purwadi,  
Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd.,  
Dr. Hj. Rr. Nanik Setyowati, M.Si.,  
Drs. H. Priatama, M.M.,  
Hj. Siti Komariah, M.Si., Ph.D.,  
Dr. Hadiati, M.Si.,  
Dr. Usep Supriatna, M.Pd.,  
Dr. Mohamad Sutisna, M.Pd.,  
Dr. H. Akadun, M.Pd.**



**Membumikan Pancasila pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Merdeka Belajar**

**Penulis:** Asep Rusmayadi Purwadi, dkk.

**ISBN:** 978-623-7443-87-2

**Penyunting:** Esep M Zaini

**Tata Sampul:** Tim GUNEMAN

**Tata Isi:** Tim GUNEMAN

**Pracetak:** Tim GUNEMAN

**Penerbit**

**GUNEMAN (Anggota IKAPI)**

**BANDUNG**

**Cetakan Pertama:** Juni 2021

**Jumlah halaman:** xii + 272

*Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit.*

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengurus bumi, langit dan alam semesta di atasnya. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memanfaatkan usia dan kehidupan kita, sekecil apa pun itu. Semoga atas bimbingan Allah Swt., kita dapat memberikan dampak positif terhadap dunia pada masa ini. Semoga Allah Swt. senantiasa membimbing kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, serta semoga sampai kepada seluruh umatnya.

Dalam suatu sesi pembinaan, pengabdian di SMP Kabupaten Garut, yang telah pernah menyampaikan kalimat berikut ini: *“student, but teacher is a student forever”*. Dari mana beliau mengutip kata-kata bijak tersebut, dari mana pun itu, saya memandang guru sebagai pendidik, pembimbing dan pelatih serta tujuannya adalah guru sekaligus siswa yang harus terus belajar. Sebab hakikatnya semua orang yang tidak menjadi guru untuk dirinya sendiri.

Namun dalam pandangan saya, secara umum guru itu menjadi tiga kelompok: kelompok yang terus belajar, baik secara formal maupun ke jenjang yang lebih tinggi, maupun

Membumikan Pancasila



**ADMINISTRASI TEORI**

Sri Suwitri • Ida Hayu Dwimawan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
BAGIAN 1 MENUMBUHKAN NILAI, NORMA DAN MORAL MELALUI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN <i>GOOD CITIZENSHIP</i> karya Asep <i>Rusmayadi Purwadi (Ketua MGMP PPKn Kabupaten Garut)</i> . 1	
BAGIAN 2 <i>BLANDED LEARNING</i> PEMBELAJARAN PPKn DI ERA 4.0 karya Dr. Hj. Sri Rahayu Pudjiastuti, M.Pd. (Program Magister PPKn STKIP Arrahmaniyah) .....	29
BAGIAN 3 KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MELALUI PENDIDIKAN KARAKTER MENUJU ERA MERDEKA BELAJAR karya Dr. Hj. Rr Nanik Setyowati, M.Si. (Prodi PPKn FISH Universitas Negeri Surabaya) .....	69
BAGIAN 4 PEMAHAMAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENYIKAPI PERKEMBANGAN ZAMAN karya <i>Drs. Priatama, M.M. (Alumni IKIP Bandung Tahun 1985)</i> ....	93
BAGIAN 5 DINAMIKA PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UUD 1945 karya Hj. Siti Komariah, M.Si., Ph.D. (Kaprodikologi UPI Bandung).....	137
BAGIAN 6 NORMA SOSIAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA karya Dr. Hadiati, M.Si. (Dosen <i>L2DIKTI Wilayah IX Sulawesi, DPK Universitas Fajar Makassar</i> ).....	165

BAGIAN 7 MEMAHAMI MODEL PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI *CIVIC  
VIRTUES* DI TINGKAT PERSEKOLAHAN karya Dr. Usep  
Supriatna, M.Pd. (Dekan FISIP UNROW Tuban).....11

BAGIAN 8 PERGESERAN PARADIGMA  
PEMBELAJARAN MENUJU *NEW NORMAL* DI ERA ABAD  
21 karya Dr. Hj. Rr Nanik Setyowati, M.Si. (Prodi PPKn, FISIP  
Universitas Negeri Surabaya) .....208

BAGIAN 9 PERJUANGAN DAN PERGERAKAN  
NASIONAL MENUJU KEMERDEKAAN INDONESIA  
karya Asep Rusmayadi Purwadi (Ketua MGMP PPKn  
Kabupaten Garut).....231

BAGIAN 10 MENGEMBALIKAN RUH PENDIDIKAN  
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM  
PROSES PEMBELAJARAN karya Dr. Mohamad Sutisna,  
M.Pd. (Dosen Pascasarjana Prodi PPKn STKIP Arrahmaniyah  
Depok) .....247

BAGIAN 11 MODEL PENGAMALAN PANCASILA karya  
Dr. H. Akadun, M.Pd. (Dosen LLDIKTI IV DPK pada STIA  
Sebelas April Sumedang).....255

**BAGIAN 1**  
**MEMBUNIKAN NILAI, NORMA**  
**PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**  
**DALAM UPAYA MEWUJUDKAN**  
**GOOD CITIZENSHIP**  
karya Asep Rusmayadi Purwadi  
Ketua MGMP PPKn Kabupaten C...

**1. Membunkan Kewarganegaraan Selayak**  
Pendidikan Kewarganegaraan (PK) merupakan mata pelajaran yang mengajarkan bukan saja milik Indonesia, namun juga pendidikan untuk kewarganegaraan sesuai dengan konstitusi yang berlaku di masing-masing negara. Di Inggris dikenal dengan *Citizenship Education*. Di Amerika Serikat bernama *Citizenship Education*. Di Mexico bernama *Education for Mexican Citizens*. Di Australia bernama *Citizenship Education*. Di New Zealand. *Life Orientation* di Afrika Selatan bernama *Citizenship Education* dan di Singapura. Dan, *Civics and Citizenship Education*.

(<http://hudianime.blogspot.com/2016/09/2006-2013.html>)

# BAGIAN 11

## MODEL PENGAMALAN PANCASILA

karya Dr. H. Akadun, M.Pd.  
(Dosen LLDIKTI IV DPK pada STIA Sebelas April  
Sumedang)

### Pendahuluan

Studi tentang model pengamalan Pancasila sangat krusial untuk efektivitas pengamalan Pancasila dalam kerangka pencapaian tujuan nasional atau pencapaian masyarakat Pancasila. Model pengamalan Pancasila memberikan kerangka dasar kepada setiap warga negara dan lembaga, baik sektor publik maupun sektor privat, dan *civil society* maupun komunitas untuk melaksanakan Pancasila. Di samping akan memberikan acuan kepada pendidik, widyaiswara, *trainer*, pimpinan dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi Pancasila termasuk di dalam Pendidikan Pancasila.

Selama ini keberhasilan pengamalan Pancasila hanya dilihat dari perspektif individu. Artinya, pengamalan Pancasila dilakukan seorang individu, apakah itu sebagai anggota masyarakat (lingkungan masyarakat), warga negara

Dari persepektif Sosiologi Pembangunan, suatu perubahan sosial itu lebih cenderung akan efektif manakala dilakukan oleh setiap individu. Teramakannya Pancasila apabila seseorang menjalankan sila-sila Pancasila dalam kehidupan secara pribadi (individual). Jika seseorang menjadi guru, maka dia mengamalkan sila-sila Pancasila ketika menjalankan peran sebagai guru. Eksternalitasnya, paling mungkin kepada anak-anak atau anak didiknya—meskipun tergantung dari kerelaan anak-anak atau anak didiknya untuk mengikuti contohnya atau arahnya. Semakin tinggi suatu jabatan publik seseorang, maka semakin luas dan banyak eksternalitasnya. Akan tetapi, eksternalitas sangat terbatas dari orang-orang di bawahnya atau asuhannya (itupun sangat tergantung pasang surut dari individu tersebut). Manakala tidak menjadi atasan lagi, maka tidak didengar lagi.

Dari perspektif Administrasi Publik/Negara, suatu perubahan sosial itu lebih cenderung akan efektif apabila dilakukan dengan cara sistemik. Maknanya suatu perubahan sosial termasuk perubahan menuju masyarakat Pancasila manakala dirancang terlebih dahulu sistemnya, tidak diserahkan kepada masing-masing individu. Sistem ini dapat berupa peraturan perundang-undangan sampai juklak dan juknis (*Standard Operating Procedure*).

Lantas, manakah yang lebih efektif model pengamalan Pancasila secara individual atau secara sistemik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dibaca paparan selanjutnya.

### Model Pengamalan Pancasila

Kategorisasi jenis pengamalan Pancasila penting dilakukan karena kedua perspektif itu membutuhkan pola sikap dan pola tindak berbeda dalam mewujudkan Pancasila di bumi Indonesia. Dalam perspektif individu berarti nilai-nilai Pancasila seperti religiusitas, humanitas, nasionalitas, soverainitas, dan sosialitas dimanifestasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia.

Seorang guru bagaimana mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan pribadi atau kehidupan sosial (sebagai guru, kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat di RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara, bahkan warga dunia). Demikian juga seorang pedagang, petani, polisi, hakim, bupati, gubernur, menteri, anggota DPR, dan presiden mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial.

Pengamalan Pancasila secara individual akan memiliki dampak kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manakala individu yang mengamalkan Pancasila itu memegang posisi manajerial dalam suatu organisasi. Manakala individu memegang *top* manajerial, maka dia dapat memerintahkan seluruh anggota organisasinya untuk mengamalkan Pancasila. Jika dia seorang *middle* manajerial, maka lingkup pengaruhnya di kekuasaan saja. Apalagi di posisi *low* manajerial semakin terbatas.

Oleh ini merupakan Seperti sering "untuk me yang paling "Bisakah perbaiki

Dalam mengusulkan mengusulkan dan kondisi Lumayan kab menjadi orang ditinggalkan mengusulkan sang pemimpin itu selipkan

Teori kondisi tertentu mengusulkan tersebar ide koran karena bertemu dengan saya ungkapkan mendapat kritik sepak bola kejuaraan res

Oleh karena itu, pengamalan Pancasila secara individu ini merupakan serendah-rendahnya bentuk pengamalan. Seperti sering dijargonkan oleh K.H. Abdullah Gymnastiar, "untuk melakukan perbaikan itu mulai dari diri sendiri, dari yang paling dekat, dari yang sedikit." Pertanyaannya, "Bisakah pengamalan Pancasila secara individu melahirkan perbaikan atau perubahan?"

Dalam teori manajemen SDM, seorang dapat mengusulkan perubahan di organisasinya dengan mengusulkan ke atasnya di waktu yang tepat. Kalau situasi dan kondisi tidak tepat, atasan tidak menerima sarannya. Lumayan kalau tidak disemprot karena dicap oleh atasan menjadi orang yang *sok* tahu, langsung diusir atau ditinggalkan begitu saja oleh pemimpin tadi. Saat yang tepat mengusulkan suatu ide atau gagasan perubahan pada saat sang pemimpin sedang membutuhkan bantuan kita. Ketika itu selipkan ide-ide perubahan.

Teori manajemen SDM tadi kadang dilupakan karena kondisi tertentu. Hal ini menimpa saya ketika akan mengusulkan strategi peningkatan prestasi olahraga (secara tersebar ide saya itu sebenarnya sudah dimuat di beberapa koran karena tidak ada yang mendengar, maka ketika bertemu dengan salah satu pembina cabang olahraga, ingin saya ungkapkan ide-ide saya tersebut). Salah satu yang sering mendapat kritik adalah cabang olahraga sepak bola. Cabang sepak bola minim prestasi, sudah amat jarang menjuarai kejuaraan resmi.

Pada suatu acara, salah satunya yang akan memberikan sambutan adalah Ketua Umum PSSI (waktu itu Pak Nurdin Halid). Saya datang ke acara itu, ingin menyampaikan unek-unek saya tentang strategi peningkatan prestasi sepak bola. Begitu beliau selesai saya ikuti. Kebetulan banyak wartawan yang mencegatnya. Saya langsung mengajukan pertanyaan, "Mengapa Bapak sering sekali mengirim pemain Indonesia ke luar negeri (ke Uruguay dan Italia)?" Jawaban dan sekaligus tesis beliau adalah, "Karena SDM pelatih Indonesia rendah". Padahal realitas menunjukkan setelah dikirim ke Uruguay dan Italia, sepak bola kita tetap *keok*. Bahkan, tesis itu masih digunakan kepengurusan organisasi pembina cabang olahraga itu telah berganti. Bukti Luis Mila diboyong menjadi pelatih, prestasi sepak bola kita tetap *jeblok*.

Oleh karena itu, saya langsung mengajukan pertanyaan sarkasme kepada beliau, "Bukankah SDM pengurus PSSI-nya yang rendah karena tidak memiliki strategi peningkatan prestasi yang jitu?" Kesal dengan pernyataan saya itu, beliau langsung pergi dan meninggalkan saya dengan tertawa geli. Tesis yang dikatakan oleh pembina dapat saya katakan dalam bahasa kasarnya salah atau dalam bahasa yang lebih halus kurang tepat. Mengapa?

Studi kepustakaan yang saya lakukan menunjukkan prestasi olahraga Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan meningkat drastis dipicu pembinaan olahraga di ketiga negara itu berbasis ilmiah (keilmuan). Sebelum ke teknik, mereka melakukan penelitian bagaimana menghasilkan atlet yang *power* (kekuatan), ketahanan, dan kecepatan. Untuk

mendapatkan S  
postur tubuh me  
hanya atlet, te  
program sehing  
dari ketiga neg  
*beke-beke* lagi  
warga negara m

Strategi k  
makanan yang  
konsumsi dagi  
Indonesia pun k  
meningkatkan p  
masih terjadi, b  
berebut bola de  
terpentat, sulit  
(kecuali untuk  
tubuhnya masi

Pengalan  
strategi pengar  
yaitu Bapak Y  
selesai menjadi  
apa strategi B  
Indonesia? Ja  
dipikirkan sa  
mengatakan pu

Dari pen  
sulit melakuka  
apa? Entah kua

mendapatkan SDM atlet yang memenuhi ketiga kriteria itu postur tubuh mereka harus ditingkatkan terlebih dahulu, tidak hanya atlet, tetapi seluruh warga negara menjadi sasaran program sehingga hasilnya rata-rata postur tubuh atlet-atlet dari ketiga negara memiliki postur tubuh yang ideal (tidak beke-beke lagi/pendek-pendek lagi). Bagaimana cara agar warga negara mereka memiliki postur ideal?

Strategi ketiga negara tersebut meningkatkan asupan makanan yang bergizi. Mereka berupaya meningkatkan konsumsi daging dan ikan per kapitanya. Oleh karena itu, Indonesia pun harus melakukan strategi seperti itu kalau mau meningkatkan prestasi olahraga, *khususnya* sepak bola. Kalau masih terjadi, bagaimana peristiwa antara Andik Firmansyah berebut bola dengan David Bechkam, yang akhirnya Andik terpenjal, sulit membayangkan kita menjadi juara dunia (kecuali untuk kategori di bawah umur 19 karena postur tubuhnya masih bisa bersaing).

Pengalaman saya kedua, ketika saya akan menanyakan strategi pengamalan Pancasila kepada Kepala BPIP lama, yaitu Bapak Yudi Latif. Dalam suatu acara setelah beliau selesai menjadi pembicara, saya langsung mengejanya. Pak, apa strategi BPIP agar Pancasila diamalkan oleh Bangsa Indonesia? Jawaban beliau sudah lengkap dan sudah dipikirkan sambil pergi terburu-terburu, walau saya mengatakan punya strategi untuk pengamalan Pancasila.

Dari pengalaman saya tersebut menjadi contoh betapa sulit melakukan perubahan manakala kita tidak menjadi apa-apa? Entah kualat atau tidak, secara hipotetik Yudi Latif pun

gagal mengemban tugas. Bagaimana ide-ide cemerlang beliau tentang Pancasila disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam pejabat dan anak bangsa lainnya, karena Beliau mengundurkan diri. Secara hipotetik program-program (berarti usulan-usulan beliau) banyak ditolak lembaga lain. Bayangkan pada posisi kepala saja susah kalau secara individual kelembagaannya setara atau di bawah organisasi lain.

Padahal melalui BPIP kalau sabar mengadvokasinya, maka lama-kelamaan akan diharapkan terjadinya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari para pejabat untuk mengamalkan Pancasila. Dalam pepatah bahasa Sunda diungkapkan, bahwa "Tikaracak ninggang batu, lama-lama jadi lebu". BPIP sebenarnya dapat melakukan itu secara sistemik, "karena sepengetahuan dan sepengalaman saya" dalam pembuatan peraturan perundangan setiap sektor yang berkaitan akan diikutsertakan dalam suatu pembahasan peraturan perundang-undangan minimal didengar suaranya ketika ada rapat koordinasi.

Misalnya dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law*, BPIP bisa mengadvokasikan bagaimana agar UU tersebut merupakan pengamalan dari Pancasila dalam rapat koordinasi lintas sektoral. Demikian juga seharusnya ada kesadaran dari kementerian atau lembaga non-kementerian untuk mengundang untuk menjadi pembicara wakil dari BPIP. Selama ini program-program sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara atau diganti sosialisasi Bukan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara  
Kewarganeg  
pengalaman

Pengar  
melalui per  
undangan m  
setiap warga  
sektor priva  
mematuhi p  
nya Pemerin  
kehidupan s  
tindak setiap  
mengamalka  
Permukiman  
Kehutanan,  
Pendidikan,  
UU dan pera

Manak  
diatur dalam  
lembaga dan  
nya, setiap o  
harus menja  
perundang-u  
lembaga yan  
diamalkan.  
bangsa, maka  
pasal 31 ini o  
No. 20 Tahun

dan Bernegara atau Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan yang disasar adalah bagaimana pengamalan Pancasila secara individual.

Pengamalan Pancasila secara sistemik atau struktural melalui peraturan perundangan. Peraturan perundangan merupakan satu langkah strategis untuk memaksa setiap warga negara, pejabat, lembaga sektor publik maupun sektor privat, baik dalam maupun luar negeri, untuk mematuhi peraturan perundang-undangan NKRI. Selayaknya Pemerintah RI harus mengatur seluruh sektor dan bidang kehidupan sehingga setiap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap orang yang berada di Indonesia dipaksa untuk mengamalkan Pancasila. Misalnya, sektor Pekerjaan Umum, Permukiman, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian, Kehutanan, Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan dan yang lainnya harus dibuat UU dan peraturan pelaksanaannya.

Manakala setiap sektor dan bidang kehidupan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap lembaga dan pejabatnya, setiap perusahaan dan pengelolaannya, setiap orang asing dan seluruh warga negara Indonesia harus menjalankan peraturan tersebut. Kalau peraturan perundang-undangan tersebut telah dipatuhi oleh orang dan lembaga yang ada di Indonesia, maka berarti Pancasila telah diamalkan. Misalnya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diatur dalam Pasal 31 UUD 1945. Berdasarkan pasal 31 ini dijabarkan menjadi UU tentang pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Lalu dijabarkan menjadi Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan atau Peraturan Kepala Lembaga atau Badan, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah (Akadun, 2020).

Ketika para pejabat negara membuat kebijakan dan ASN melaksanakan kebijakan tersebut juga harus memiliki landasan hukum yang baik berupa UU dan peraturan pelaksanaannya. Implikasinya setiap program-program pemerintah dapat merupakan pengamalan Pancasila. Misalnya, pembangunan sekolah, program sertifikasi guru, program pemberian beasiswa, program peningkatan prestasi guru dan dosen juga merupakan pengamalan Pancasila. Ketika guru atau dosen berprestasi atau murid berprestasi itu merupakan pengamalan Pancasila.

Dasar filosofis model pengamalan Pancasila secara sistemik adalah Pancasila sebagai dasar negara atau Norma Dasar (*Grundnorm*) menurut Hans Kelsen dan Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) menurut Hans Nawiasky, Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara (MPR, 2013; Attamimi, 1991). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, Pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan penyelenggara hukum, Pancasila pembangunan h dengan pendapat Norma Hukum berlapis dalam s lebih rendah be yang lebih *Staatsfundament* itu semua dokur UU/PERPU, PP substansinya h bertentangan den

Adapun mo memiliki dasar f (*way of life*) (MP hidup bangsa me kehidupan bangsa Pancasila (Weli krtalisasi dari ni kehidupan bangsa adalah: nilai dan nilai dan jiwa k persatuan (nasiona (souverenitas); da

Makna Pan Indonesia adalah s

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum. Secara akademik, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hans Nawiasky tentang Teori Hierarki Norma Hukum, bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Yang disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara). Untuk itu semua dokumen hukum negara mulai UUD, TAP MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kab/Kota, substansinya harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Adapun model pengamalan Pancasila secara individual memiliki dasar filosofis Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) (MPR RI, 2013). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna, bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila (Welianto, 2020). Karena juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut adalah: nilai dan jiwa ketuhanan-keagamaan (religiusitas); nilai dan jiwa kemanusiaan (humanitas); nilai dan jiwa persatuan (nasionalitas); nilai dan jiwa kerakyatan-demokrasi (souverenitas); dan nilai dan jiwa keadilan sosial (sosialitas).

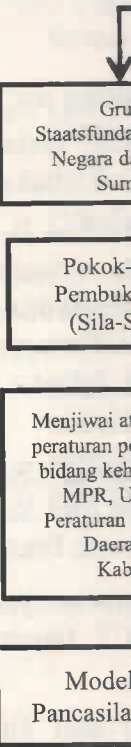
Makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat

Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang sering disebut juga sebagai *way of life*, pegangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan dunia.

Meskipun eksternalitas model pengamalan Pancasila secara sistemik lebih luas pengaruh atau dampaknya ketimbang model pengamalan Pancasila secara individu, akan tetapi sistem yang Pancasila-lais itu diciptakan oleh orang-orang (terutama pejabat negara) yang Pancasila-lais, maka penerapan model pengamalan Pancasila harus secara simultan antara sistemik dan individual.

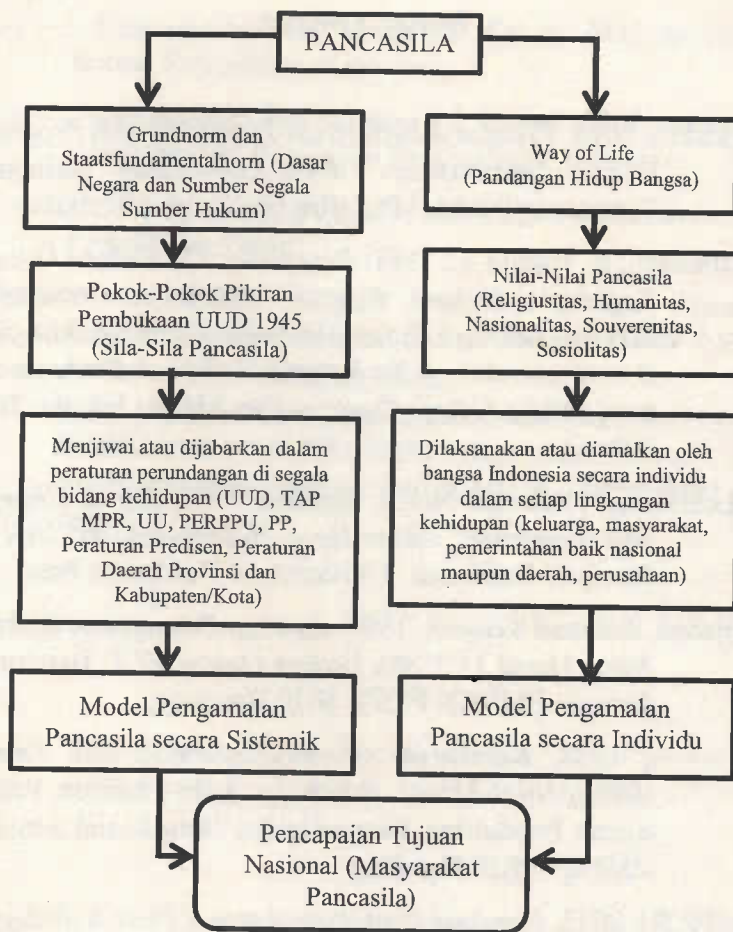
### Penutup

Selama ini pengamalan Pancasila cenderung menggunakan model individual. Implikasi model sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila cenderung untuk pembelajaran bagaimana individu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Padahal model pengamalan Pancasila memiliki eksternalitas dan jangkauan lebih masif, sistematis, dan terstruktur ketimbang model pengamalan Pancasila secara sistemik. Oleh karena itu, diperlukan model sosialisasi dan internalisasi Pancasila yang mendukung model pengamalan Pancasila secara sistemik termasuk dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan/atau Pendidikan Kewarganegaraan.



langkah laku sehari-hari.  
 adalah Pancasila, yang  
 of life, pegangan hidup,  
 ia.  
 el pengamalan Pancasila  
 pengaruh atau dampaknya  
 Pancasila secara individu,  
 diciptakan oleh orang-  
 yang Pancasila-lais, maka  
 Pancasila harus secara  
 al.

Pancasila cenderung  
 aplikasi model sosialisasi  
 Pancasila cenderung untuk  
 mengamalkan nilai-nilai  
 Pancasila memiliki  
 masif, sistematis, dan  
 amalan Pancasila secara  
 an model sosialisasi dan  
 kung model pengamalan  
 k dalam pembelajaran  
 Pendidikan Kewarga-



Struktur Model Pengamalan Pancasila

## Daftar Pustaka

- Akadun, 2020. *Filsafat Administrasi Publik* (Modul Program Doktor Administrasi Publik Universitas Terbuka). Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Attamimi, A. Hamid S., 1991. *Pancasila: Cit Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia (Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara)*, penyunting: Oetoyo Oesman dan Alfian. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Haferkamp, Hans and Neil J. Smelser, 1992. *Social Change and Modernity*, editor Hans Haferkamp and Neil J. Smelser. California: University of California Press.
- Djahiri, Achmad Kosasih, 1995. *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Games Dalam VCT*. Bandung: Jurusan PMPKN FPIPS IKIP Bandung.
- , 1988. *Kurikulum (Formal/Informal) dan Dunia Afektif-Nilai-Moral*. Bandung: Laboratorium Pengajaran Pendidikan Pancasila dan Ilmu Sosial Jurusan PMPKN IKIP Bandung.
- MPR RI, 2013. *Panduan Masyarakat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

-----, *Undang-Undang Sistem Pendidikan*

-----, *Undang-Undang Pembentukan*

-----, *Undang-Undang Pendidikan*

Welianto, Ari, 2021. *Negara dan*

*Pertahanan*

<https://www>

00769/kenap

pandangan-h

Mei 2021.

-----, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

-----, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi.

Welianto, Ari, 2020. "Kenapa Pancasila sebagai Dasar  
Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Perlu Kita  
Pertahankan?". Kompas.com  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/29/143000769/kenapa-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa-perlu?page=all>, didownload 1  
Mei 2021.